

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR ARTHA HUDA ABADI
TAHUN 2021**



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI

**Jl. Pati-Tayu, Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati
TELEPON: 0295452436**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG-Good Corporate Governance) pada PT BPR Artha Huda Abadi pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

PT. BPR Artha Huda Abadi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Regulator Otoritas Jasa Keuangan sehingga PT. BPR Artha Huda Abadi dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Pati. Dalam menjalankan operasional perbankan PT. BPR Artha Huda Abadi senantiasa memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian Bank (prudential banking practices). Hal ini sudah menjadi kebutuhan PT. BPR Artha Huda Abadi dan juga untuk menegakkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku umum serta melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama bagi PT. BPR Artha Huda Abadi dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu:

1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (Independency)
5. Kewajaran (fairness)

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	H. Amin Salafuddin, SE.
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan PT. BPR Artha Huda Abadi;</p> <p>b. Mengelola PT. BPR Artha Huda Abadi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. BPR Artha Huda Abadi;</p> <p>c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan/atau Otoritas Lainnya;</p> <p>e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:</p> <p>1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan</p> <p>2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.</p> <p>f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;</p> <p>g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p> <p>i. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>j. Menetapkan kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>k. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.</p> <p>l. Direktur utama wajib memiliki ean melaksanakan pedoman dan tata kerja yang meliputi: Etika kerja, waktu kerja dan Peraturan rapat.</p> <p>m. Menetapkan kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p>			
2.	Nama	:	H. Dliaul Khaq, MM
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional sekaligus Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan:</p> <p>a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional PT. BPR</p>			

- Artha Huda Abadi;
- b. Menyusun rencana kerja bidang keuangan untuk diajukan dan mendapatkan persetujuan RUPS;
 - c. Melaksanakan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan operasional bidang keuangan;
 - d. Melaksanakan monitoring pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) dalam bidang keuangan;
 - e. Memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas TSI terintegrasi dalam manajemen risiko PT. BPR Artha Huda Abadi secara keseluruhan;
 - f. Melaksanakan RBB dalam bidang TSI.
 - g. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan PT. BPR Artha Huda Abadi telah memebuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas lainnya, dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau perundang-undangan lain;
 - h. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha PT BPR Artha Huda Abadi tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
 - i. Mamasatkan terlaksananya sosoalisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan tekini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
 - j. Melaporkan kepada Direktur utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh karyawan PT. BPR Artha Huda Abadi;
 - k. Malakukan pengawasan aktif terkait penerapam program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - l. Menetapkan kebijakan dan prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - m. Menetapkan kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris terkait:

1. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola
2. Penunjukkan akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
3. Pembukaan Kantor Kas Pamotan
5. Penerapan Manajemen Risiko
6. APU-PPT
7. Temuan Pemeriksaan OJK
8. Memonitor debitur yang terdampak dampak COVID-19.
9. Temuan Audit Internal

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	H. Adbul Ghofarrozin
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a.	Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha PT. BPR Artha Huda Abadi di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;	
	b.	Melaksanakan pengawasan trhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	

	<p>serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>c. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitu mengenai Debitur inti, Debitur terkait, dan debitur bermasalah;\</p> <p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian UAng (APU) dan Pencegahan Penbanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>g. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>h. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>i. Memastikan PE. Audit Intern dan PE. Manajemen Ridiko menjalankan tugasnya secara efektif;</p> <p>j. Melakukan review dan menyetujui Rencana Bisnis dan Laporan Tahunan.</p>		
2.	Nama	:	H. Ghufron Halim
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>c. Memastikan bahwa direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE. Audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa keuangan, dan/atau otoritas lainnya;</p> <p>d. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>e. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);</p> <p>f. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko;</p> <p>g. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :</p> <p>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</p> <p>h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategi dan menyiapkan materi serta agenda rapat Dewan Komisaris;</p> <p>i. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.</p>		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	<p>Direksi telah menindaklanjuti dengan baik atas rekomendasi Dewan Komisaris terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penerapan Tata Kelola 2. Penunjukkan akuntan publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) 3. Pembukaan Kantor Kas Pamotan 5. Penerapan Manajemen Risiko 6. APU-PPT 7. Temuan Pemeriksaan OJK 8. Memonitor debitur yang terdampak dampak COVID-19. 9. Temuan Audit Internal 		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		

Tidak ada

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak ada	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Tidak ada	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-



3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak ada			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Amin Salafuddin, SE.	Rp151.300.000,00	2.75%
2.	H. Dliaul Khaq, MM	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Amin Salafuddin, SE.	620100	PT BPRS Artha Mas Abadi	3.53%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Amin Salafuddin, SE.	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
2.	H. Dliaul Khaq, MM	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	H. Amin Salafuddin, SE.	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
2.	H. Dliaul Khaq, MM	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Abdul Ghofarrozin	Rp3.522.500.000,00	64.04%
2.	H. Ghuftron Halim	Rp1.013.900.000,00	18.44%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Abdul Ghofarrozin	620100	PT BPRS Artha Mas Abadi	52.94%
2.	H. Ghuftron Halim	620100	PT BPRS Artha Mas Abadi	8.23%
3.	H. Ghuftron Halim	620063	PT BPRS Gala Mitra Abadi	80.26%
4.	H. Ghuftron Halim	620167	PT BPRS Saka Dana Mulia	35.6%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Abdul Ghofarrozin	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
2.	H. Ghuftron Halim	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Abdul Ghofarrozin	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
2.	H. Ghuftron Halim	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada	Tidak ada - Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
tidak ada				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp399.600.000,00	2	Rp289.200.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp411.600.000,00	2	Rp0,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp161.000.000,00	2	Rp94.500.000,00
Total			Rp972.200.000,00		Rp383.700.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (1)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.7 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Tidak ada	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2021	4	Rapat Koordinasi Dekom dengan Direksi tentang Rencana RUPS dan evaluasi kinerja perusahaan Tahun 2021.
2.	02 Maret 2021	2	Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Persiapan bulan Ramadhan 1442 H.
3.	04 Mei 2021	2	Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Libur Hari Raya Idul Fitri 1422 H.
4.	14 Juli 2021	4	Evaluasi Kinereja Perusahaan semester I tahun 2021, dan evaluasi Tindak lanjut Kebijakan PPKM terkait Pencegahan dan Penanganan Covid 19 dilingkungan Perusahaan.
5.	05 Oktober 2021	2	Evaluasi Kinerja Perusahaan dan Rencana pembukaan kantor kas Wilayah Kantor Cabang Rembang.
6.	11 November 2021	2	Rapat Penetapan RBB 2022 dan Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Tidak ada			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	H. Adbul Ghofarrozin	5	1	100%
2.	H. Ghufon Halim	5	1	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Artha Huda Abadi								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
nihil		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	H. Abdulghofarrozin	Komisaris Utama	H. Amin Salafuddin, SE	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Kas Jaken	75 juta rupiah	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	09 Februari 2021	Sosial	Bantuan Bencana Alam Banjir di Desa Ngantru, Kecamatan Gabus Kab. Pati.	POSKO Banjir Desa Ngantru	Rp20.000.000,00
2.	26 Februari 2021	Sosial	Bantuan Bencana Alam banjir di Kab. Pati.	Basket Pati	Rp1.000.000,00
3.	04 Maret 2021	Sosial	Sumbangan Masjid AT_TAUBAH Lapas Pati	Masjid AT_TAUBAH	Rp1.000.000,00
4.	05 Maret 2021	Sosial	Bantuan pembelian kaos dan celana olah raga MI Nurul Huda Bajomulyo Kecamatan Juwana	MI Nurul Huda Bajomulyo	Rp250.000,00



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI

			Kabupaten Pati		
5.	31 Maret 2021	Sosial	Sumbangan dana untuk acara Harlah STIEF dan Kajian Roadshow FoSSEI Komisariat Pati	STIEF	Rp200.000,00
6.	22 April 2021	Sosial	Sumbangan pembangunan Masjid BAITUL IZZAH Ds. Waturoyo, Kec. Margoyoso, Kab. Pati.	Yayasan Hidayatul Islam Waturoyo	Rp2.000.000,00
7.	23 April 2021	Sosial	Sumbangan untuk kegiatan Gema Ramadhan Masjid At-Taubah Lapas Pati.	Masjid AT-Taubah Lapas Pati	Rp500.000,00
8.	11 Mei 2021	Sosial	Bantuan sumbangan untuk badan pengelola zakat dan Shodaqoh Desa Waturoyo	Badan Pengelola Zakat dan Shodaqoh Waturoyo	Rp1.000.000,00
9.	25 Mei 2021	Sosial	Bantuan Dana untuk Yayasan Nurus salam, Ds. Ronggo.	Yayasan Nurus Salam Ronggo	Rp300.000,00
10.	18 Juni 2021	Sosial	Sumbangan untuk sedekah bumi Desa Sumberejo	Panitia sedekah bumi	Rp250.000,00
11.	02 Juli 2021	Sosial	Biaya sumbangan sedekah bumi Desa Mojo	Panitia Sedekah Bumi Desa Mojo	Rp100.000,00
12.	16 Agustus 2022	Sosial	Sumbangan untuk acara peringatan tgl 10 Muharam	Panitia Peringatan 10 Muharam	Rp200.000,00
13.	24 Agustus 2021	Sosial	Bantuan dana untuk Renovasi Masjid Yamp Baitul Qodir	Takmir Masjid Baitul Qodir	Rp500.000,00
14.	06 Oktober 2021	Sosial	Bantuan Dana untuk Mapaba PMII Komsat Syekh Mutamakkin	Penitia Mapaba PMII Komsat Syekh Mutammakin	Rp150.000,00
15.	19 Oktober 2021	Sosial	Sumbangan Dana untuk Pengajian Gema Sholawat RT 01, RW 03 Desa Waturoyo	Panitia Pengajian Maulid Nabi Muhammad Saw Waturoyo	Rp200.000,00
16.	22 Oktober 2021	Sosial	Sumbangan Kegiatan Dialog Kesehatan dan Donor Darah Santri	Panitia Haul KH.MA. Sahal Mahfudh	Rp5.000.000,00



PT. BPR ARTHA HUDA ABADI

			Dalam Rangka Memperingati Haul KHMA. Sahal Mahdudh.		
17.	02 November 2021	Sosial	Pemberian bantuan dana kepada KSEI STIEF IPMAFA dalam acara Penerimaan Anggota Baru.	Panitia Penerimaan anggota Baru	Rp200.000,00
18.	12 November 2021	Sosial	Peringatan Haul Syekh Abdul Qodir Al Jailani	Panitia Haul Syekh Abdul Qodir Al Jailani	Rp500.000,00
19.	25 November 2021	Sosial	Bantuan dana pembangunan masjid Al-Falah Desa Ronggo	Panitia Pembangunan Masjid Al-Falah Ds. Ronggo	Rp300.000,00
20.	17 Desember 2021	Sosial	Sumbangan dana untuk kegiatan acara hari ibu di Ds. Sumberejo Rembang.	Panitia Peringatan Hari Ibu Ds. Sumberejo Rembang	Rp100.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada					

BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR ARTHA HUDA ABADI
Alamat	: Jl. Pati-Tayu, Km. 19 Waturoyo Margoyoso Pati
Nomor Telepon	: 0295452436
Posisi Laporan	: Desember 2021
Modal Inti	: Rp11.916.142.355,00
Total Aset	: Rp147.204.265.537,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR ARTHA HUDA ABADI Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.00	0.400
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.00	0.300
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.00	0.200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.00	0.200
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.00	0.050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.00	0.150
10	Rencana Bisnis BPR	2.00	0.150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.95	0.146
Nilai Komposit			2.000
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2)

Jumlah anggota Direksi PT. Artha Huda Abadi 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Operasional yang juga merupakan anggota Direktur YMF Kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)

Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. Artha Huda Abadi sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

PT. Artha Huda Abadi telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

PT. Artha Huda Abadi telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah- langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2)

PE Audit Intern di PT. Artha Huda Abadi telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK)

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

PT. Artha Huda Abadi telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi oleh BPR.



8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)

PT. Artha Huda Abadi telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profl Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profl Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

PT. Artha Huda Abadi telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. BPR Artha Huda Abadi dalam menjalankan Operasional selalu berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Rencana Bisnis Bank PT. Artha Huda Abadi telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.95)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan PT. Artha Huda Abadi telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Artha Huda Abadi juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi setiap triwulan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT. Artha Huda Abadi masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas untuk mengisi beberapa posisi yang kosong.

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini.



Pati, 06 April 2022

PT BPR ARTHA HUDA ABADI

Menyetujui

H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed.
Komisaris Utama



H. Amin Salafuddin, SE.
Direktur Utama